

MEWUJUDKAN "KONSEP LINK AND MATCH" DALAM FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Oleh: Anik Ghufron¹

Pendahuluan

Di antara beberapa hal menarik yang akhir-akhir ini masih terdengar ramai diperbincangkan dan bahkan dijadikan sebagai salah satu arah kebijakan di bidang pendidikan adalah persoalan tentang masih rendahnya daya serap lulusan dunia pendidikan memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, khususnya lulusan FIP pada sektor-sektor pembangunan yang menjadi prioritas Pemerintah. Adanya kenyataan yang demikian, sangatlah tepat apabila Mendikbud RI dalam beberapa kesempatan menegaskan kembali perlunya dunia pendidikan memiliki kesesuaian dan kesepadanan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk penegasannya itu dikemukakan kembali ketika menyampaikan pidato pengarahan dalam rapat kerja FIP se-Indonesia di Bandung pada tanggal 8 November 1993, di mana FIP diharapkan meningkatkan relevansi dan kualitasnya. Selanjutnya, dikatakan pula bahwa aspek relevansi ini harus ditekankan pada relevansi dalam arti *link and match* FIP dengan kebutuhan guru dan tenaga non guru sesuai dengan jumlah, kualifikasi, dan bidang keahlian tenaga kependidikan (Mendikbud RI, 1993: 3).

Realisasi terhadap ajakan Mendikbud tersebut, para Pejabat FIP IKIP se-Indonesia telah melakukan serangkaian pertemuan, baik di Bandung maupun di Malang, dan bahkan diperkirakan pada bulan Januari 1995 ini akan diadakan pertemuan di IKIP Padang yang intinya merupakan pertemuan paripurna yang membahas tentang langkah-langkah yang mesti dilakukan FIP IKIP guna menjawab dan merealisasikan terhadap

1. Anik Ghufron, pengajar pada jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan
FIP IKIP YOGYAKARTA

sejumlah kebijakan Mendikbud, terutama kebijakan tentang upaya peningkatan kualitas dan relevansi LPTK.

Beberapa persoalan muncul berkenaan dengan hal di atas adalah: benarkah FIP selama ini kurang mampu atau bahkan telah meninggalkan masyarakat pemakainya, sehingga konsep *link and match*" ditegaskan kembali? Komponen-komponen apa sajakah yang ada di FIP yang harus ditingkatkan kualitasnya sehingga mampu memenuhi sasaran dari konsep *link and match*? Apabila lebih diorientasikan kepada kebutuhan tenaga kependidikan yang secara definitif ada di lembaga persekolahan, hal-hal apa sajakah yang menjadi dampak terhadap pengembangan FIP di masa depan? Tulisan ini mencoba mengulas persoalan-persoalan tersebut.

Misi FIP dalam Penyiapan Tenaga Kependidikan

Apabila dilihat dari satuan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada umumnya, maka FIP sebagai salah satu fakultas yang berada di LPTK termasuk rumpun pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu kependidikan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi). Program pendidikan akademik diarahkan pada peningkatan mutu dan wawasan ilmu kependidikan, sedangkan program pendidikan profesional diarahkan pada peningkatan kemampuan penerapan ilmu kependidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Didirikannya FIP sebagai salah satu fakultas di lingkungan LPTK adalah untuk menyiapkan lulusannya menjadi tenaga kependidikan baik guru maupun non guru, yang hingga saat ini masih dibutuhkan keberadaannya di tanah air. Bahkan dalam beberapa situasi dan kondisi khusus, mendapat tugas untuk menyelenggarakan program Akta Mengajar yang diperuntukkan bagi pihak-pihak lain dari disiplin ilmu murni apabila hendak dan berniat menyelenggarakan proses pendidikan, baik pada lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan Depdikbud ataupun di luar Depdikbud (Pendidikan Kedinasan). Dengan demikian, apabila dewasa

dan pengembangan kurikulumnya saja, akan tetapi harus dikaitkan dengan komponen lainnya, seperti: kualitas dosen, piranti pendukung proses pendidikan, pola pelaksanaan PPL, dan lain-lain. Alasannya, meskipun kurikulum itu merupakan komponen yang mempersoalkan tentang "apa yang akan menjadi pengalaman belajar yang harus dimiliki peserta didik", akan tetapi apabila tidak didukung oleh komponen lain tentu tidak bisa diwujudkan dan kemungkinan kecil menjadi milik peserta didik.

Pemahaman Makna Kebijakan secara Komprehensif

Dalam terminologi kurikulum, arti relevansi dapat dilihat dari dua segi yaitu relevansi secara internal dan secara eksternal. Dalam konteks relevansi yang menekankan arti *link and match* dengan kebutuhan masyarakat (pasar kerja) maka arti relevansi di sini lebih diarahkan pada relevansi yang bersifat eksternal, yaitu sejauhmana lulusan FIP mampu memenuhi harapan atau kebutuhan masyarakat pemakai lulusan tersebut. Oleh karena itu, apabila hal ini tetap saja digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan kualitas FIP, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

Pertama, meskipun FIP telah menerapkan bentuk kurikulum baru yang bersifat fleksibel akan tetapi dalam pelaksanaannya hendaklah memperhatikan keterkaitan dan rumpun bidang studi yang dipilih mahasiswa sebagai bidang studi pilihan dengan bidang studi pilihan utamanya. Demikian juga, hendaklah lebih menekankan kedalaman materi kurikulumnya (termasuk pemberian sejumlah materi yang membentuk keahlian profesional guru) dan bukan sekedar menekankan banyaknya mata ajar yang diberikan mahasiswa. *Kedua*, para pengajar yang ada hendaklah ditingkatkan kualitas kemampuan unjuk kerjanya, karena bagaimanapun baiknya kurikulum apabila para pengajarnya kurang berkualitas niscaya akan sia-sia. Keberhasilan suatu kurikulum banyak ditentukan oleh kualitas para pengajarnya, karena pengajar pada dasarnya adalah penerjemah dan atau pengejawantah kurikulum bagi mahasiswanya. *Ketiga*, perlunya peningkatan dan perbaikan pola PPL bagi mahasiswa dalam bentuk

berlaku di lembaga pendidikan di bawahnya dan bukan berdasarkan pada pengembangan menurut disiplin ilmu.

3. Apabila kurikulum fleksibel dijadikan alternatif dalam rangka pemberian peluang lulusan FIP pada saat bekerja nanti untuk mengisi kekosongan guru bidang studi yang saat itu dibutuhkan, apakah jenis bidang studi yang merupakan pilihan kedua itu secara pasti sama dengan jenis bidang studi yang dibutuhkan pada saat itu. Apakah sudah ada legalitas pengangkatan terhadap calon guru dengan kualifikasi bidang studi pilihan kedua, mengingat calon-calon guru dengan kualifikasi bidang studi pilihan utama saja sudah cukup ketat dalam proses pengangkatan. Oleh karena itu, FIP perlu memiliki akurasi data tentang peta kebutuhan tenaga guru yang saat ini benar-benar dibutuhkan di lapangan dengan para pihak yang terlibat dalam pengadaan, pengangkatan, dan pembinaan tenaga guru.

Kiranya yang menjadi persoalan penting untuk dipikirkan dan dicarikan jalan keluarnya dengan segera adalah "bagaimana formulasi bentuk FIP yang tegar dan tetap eksis di tengah-tengah masyarakat, baik sebagai lembaga pendidikan yang bersifat akademik maupun profesional yang tidak mudah tergoyah akibat gencarnya isu-isu rendahnya kualitas pendidikan di negara tercinta".

Kesimpulan

Ditegaskannya kembali makna *link and match* FIP dengan kebutuhan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan masyarakat sangatlah tepat bagi upaya pengembangan FIP di era PJP II. Namun demikian, konsep *link and match* ini harus diterjemahkan secara proporsional sehingga misinya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bersifat akademik dan profesional dapat terwujud.

Apabila isu *link and match* dijadikan salah satu kebijakan dalam pengembangan FIP dewasa ini maka dalam pengembangannya hendaklah dilakukan secara integral dan mendasarkan pada konsep dasar dan atau misi utama dari FIP dan jangan hanya bersifat parsial sebab akan

berdampak yang kurang menguntungkan bagi pengembangan FIP di masa mendatang.

Beberapa kendala apabila konsep *link and match* pada program-program studi di FIP lebih ditekankan maknanya sebatas pemenuhan tenaga kependidikan yang bekerja di sektor persekolahan penerima lulusan FIP atau sebatas yang mampu mengajar tatap muka di kelas, adalah: (1) adanya kecenderungan pembatasan misi FIP yang lebih diarahkan pada penyiapan tenaga kependidikan yang bekerja di lembaga persekolahan, (2) terjadinya penciutan program studi di lingkungan FIP, khususnya sejumlah program studi yang saat ini tidak dibutuhkan di lembaga persekolahan, padahal bidang-bidang studi tersebut sangat esensial bagi keberadaan FIP, dan (3) apabila kurikulum fleksibel dijadikan alternatif untuk mengantisipasi ketidaksesuaian dan ketidaksepadanan FIP dengan kebutuhan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan masyarakat, hendaklah memperhatikan keterkaitan dan rumpun bidang studi yang dipilih mahasiswa sebagai bidang studi pilihan dengan bidang studi pilihan utamanya.

Sumber Rujukan

- Anonimous. (1990). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Depdikbud RI.
- Conny R. Semiawan dan Soedijarto. (1991). *Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Ibrahim, R. (1992). "Fleksibilitas Kurikulum: Tinjauan Singkat dengan Mengacu pada Kurikulum Pendidikan Guru Sekolah Menengah". *Makalah Seminar Pengembangan Kurikulum Menghadapi Pembangunan Pendidikan Jangka Panjang Tahap Ke Dua tanggal 25 Juli 1992 di IKIP Bandung*. Bandung: PPS IKIP Bandung.

- Djohar. (1991). "Suatu Pemikiran: Pengembangan IKIP Yogyakarta Berwawasan Kebudayaan". *Cakrawala Pendidikan, Edisi Khusus Tahun X Mei 1991*. Yogyakarta: IKIP Yogyakarta.
- Said Hamid Hasan. (1992). "Fleksibilitas Kurikulum Menghadapi Keragaman Problema Pendidikan dan Ketenagaan Kerja di Lapangan". *Makalah Seminar Pengembangan Kurikulum Menghadapi Pembangunan Pendidikan Jangka Panjang Tahap Ke Dua tanggal 25 Juli 1992 di IKIP Bandung*. Bandung: PPS IKIP Bandung.
- Wardiman Djojonegoro. (1993). "Upaya Peningkatan Relevansi dan Mutu LPTK Menghadapi PJPT II". *Pidato Pengarahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada Rapat Kerja LPTK se Indonesia di IKIP Bandung*. Bandung: IKIP Bandung.